

# Lanskap Demonstrasi Jakarta: Komunikasi Politik Warga Kota dalam Ruang Publik

Muhamamd Agung Dharmajaya<sup>1</sup>, Aminah Swarnawati<sup>2</sup>, M. Elfan Kaukab<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Economics and Business, Universitas Matha'ul Anwar Pandegelang, Banten  
agungdharma@unmabanten.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
aminah.swarnawati@umj.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia  
Email: elfan@unsiq.ac.id

DOI: 10.32699/resolusi.v9i1.11016

Submitted: 2026-03-03, Revised: 2026-04-23, Accepted: 2026-04-28

## Abstract

*Demonstrations are an integral part of democracy in Jakarta, the largest city and capital of Indonesia. Throughout 2020, Pola Metro Jaya recorded 993 demonstrations, which reflects the high level of community participation in voicing important issues. This research maps the themes of demonstrations in Jakarta in the context of more integrative city development, using content analysis of online news headlines from 2014-2024. Using a constituency thematic framework with 12 frames, the results showed that five frames (ethnicity, age, religion, gender, and family) were not found in the demonstrations analyzed. Territorial and citizen frames dominate, followed by ideological, disadvantaged, functional, material and environmental frames. These findings suggest that territorial and public interest issues are more likely to trigger demonstrations in Jakarta, reflecting community sensitivity to land use and space requirements. Demonstrations are often related to broad public issues, emphasizing the importance of spatial justice and sustainable development.*

**Keywords:** *demonstrations, social change, public interest, urban society, democracy*

## Abstrak

*Demonstrasi merupakan bagian integral dari demokrasi dan telah menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan warga Jakarta, kota terbesar sekaligus ibukota Indonesia. Sepanjang 2020, Pola Metro Jaya mencatat 993 demonstrasi, yang mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan isu-isu penting. Penelitian ini memetakan tema-tema demonstrasi di Jakarta dalam konteks pembangunan kota yang lebih integratif, menggunakan analisis konten headline berita daring dari 2014-2024. Menggunakan kerangka tematik konstituensi dengan 12 bingkai, hasil penelitian menunjukkan lima bingkai (etnik, usia, agama, gender, dan keluarga) tidak ditemukan dalam demonstrasi yang dianalisis. Bingkai teritorial dan warga negara mendominasi, diikuti oleh bingkai ideologis, disadvantaged, fungsional, material, dan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa isu-isu teritorial dan kepentingan umum lebih cenderung memicu demonstrasi di Jakarta, mencerminkan sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan lahan dan kebutuhan ruang. Demonstrasi seringkali terkait dengan isu-isu publik secara luas, menekankan pentingnya keadilan spasial dan pembangunan yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *demonstrasi, perubahan sosial, kepentingan publik, masyarakat urban, demokrasi*

## **Pendahuluan**

Demonstrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Sebagai ibukota negara sekaligus kota terbesar di Indonesia, demonstrasi telah menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan warga kota ini. Pola Metro Jaya mencatat sepanjang 2020 terjadi 993 demonstrasi di Kota Jakarta (Kompas,2020). Nilai ini terjadi pada era pandemi. Pada era sebelum pandemi, jumlah ini mencapai 1.200 pada tahun 2018 (Rahman, 2022). Banyaknya aktivitas demonstrasi di Kota Jakarta mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat untuk memperjuangkan suatu masalah di tingkat nasional maupun daerah.

Demonstrasi memiliki peran penting dalam mengembangkan partisipasi politik di masyarakat (Saud & Margono, 2021) dan merupakan indikator aktivitas seorang warga negara (Fredriksson & Tritter, 2020). Demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik langsung di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan kebutuhannya secara kolektif dalam bentuk resistensi non-kekerasan (Khodary & Salah, 2020). Tindakan ini memperkuat keterlibatan warga dalam proses politik dan pembangunan kota. Partisipasi ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam pembuatan kebijakan. Demonstrasi merupakan metode langsung dan informal yang menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder politik lainnya diawasi oleh masyarakat (McDonough & Rodríguez, 2020). Demonstrasi menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pihak pemerintah dan pengembang dalam setiap proyek pembangunan. Hal ini mendorong pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik.

Walaupun memberikan manfaat pada partisipasi politik, keterlibatan masyarakat, dan menjaga akuntabilitas pemerintah, demonstrasi masih belum diteliti secara luas dalam konteks apa yang mereka komunikasikan kepada pemerintah dan publik. Hal ini patut disayangkan mengingat pengetahuan mengenai tema demonstrasi memungkinkan diketahuinya dalam hal aspek pembangunan yang mana dialog dan negosiasi berjalan dan dalam aspek apa kemungkinan kebijakan masih belum menguntungkan semua pihak.

Dalam konteks kota metropolitan seperti Jakarta, demonstrasi tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa politik insidental, melainkan sebagai ekspresi warga atas dinamika pembangunan perkotaan yang sering kali memunculkan ketimpangan akses, perebutan ruang, dan perbedaan kepentingan antarkelompok (Winarso et al., 2015). Pembangunan kota pada satu sisi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi, namun pada sisi lain dapat menghadirkan eksklusi sosial ketika manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata. Dalam situasi demikian, demonstrasi menjadi medium bagi warga untuk menegaskan hak atas kota, yaitu hak untuk tidak hanya tinggal di dalam kota, tetapi juga turut menentukan arah perubahan ruang dan kebijakan yang membentuk kehidupan urban sehari-hari (Ridwan & Musta'in, 2017). Dengan demikian, demonstrasi di Jakarta dapat dibaca sebagai bentuk artikulasi tuntutan atas pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang terdampak.

Selain berlangsung di ruang fisik kota, demonstrasi juga bekerja sebagai praktik komunikasi publik yang membentuk cara suatu isu dipahami oleh pemerintah, media, dan

masyarakat luas (Jubba et al., 2020). Aksi demonstrasi tidak hanya menyampaikan penolakan atau tuntutan, tetapi juga membangun narasi mengenai masalah publik, pihak yang dianggap bertanggung jawab, serta bentuk solusi yang diharapkan. Dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi, pesan demonstrasi bahkan melampaui lokasi aksi karena diperkuat oleh peliputan media dan sirkulasi informasi di platform digital, sehingga memperluas daya jangkau opini publik dan tekanan politik yang ditimbulkannya (Billahi, 2025). Oleh karena itu, pemetaan tema demonstrasi menjadi penting bukan hanya untuk mengidentifikasi isu yang dipersoalkan warga, tetapi juga untuk memahami bagaimana ruang publik perkotaan bekerja dalam menghubungkan pengalaman ketidakadilan, ekspresi kolektif, dan agenda pembangunan kota.

Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan tema demonstrasi yang menuntun pembangunan Kota Jakarta yang lebih integratif dalam memberikan manfaat pada semua pihak. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan dalam tema apa saja demonstrasi warga Jakarta dilakukan untuk memperbaiki pembangunan Kota Jakarta?

Penelitian ini menggunakan teori public sphere dari Habermas sebagai teori komunikasi di ruang publik. Teori ruang publik Habermas berpendapat bahwa ruang publik adalah ruang dimana warga negara berkumpul untuk membahas dan mempengaruhi tindakan politik (Larsen, 2020). Ruang publik penting untuk partisipasi demokrasi dimana individu-individu dapat dengan bebas membahas dan memperdebatkan masalah-masalah yang dianggap kepentingan bersama (Habermas, 2020). Teori ini sejalan dengan pandangan bahwa demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik langsung yang memungkinkan warga negara terlibat dalam proses demokrasi. Karena itu, demonstrasi di Kota Jakarta merupakan manifestasi praktis dari ruang publik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis konten headline berita daring untuk mengetahui tema-tema demonstrasi yang dilakukan masyarakat Kota Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan deduktif untuk menggunakan kerangka tematik yang telah ada yaitu bingkai konstituensi dari Wonka (2024). Bingkai konstituensi merupakan tema-tema kebijakan publik yang dibedakan berdasarkan sasaran kebijakan tersebut. Menurut Wonka (2024), bingkai konstituensi, bersama dengan bingkai kebijakan, merupakan dua tipe bingkai yang paling penting untuk upaya advokasi aktor politik dalam membuat kebijakan. Terdapat 11 bingkai konstituensi yaitu warga negara, ideologis, kelompok kurang beruntung, etnik, teritorial, usia, fungsional, agama, material, gender, dan keluarga. Peneliti menambahkan satu bingkai lagi yaitu bingkai lingkungan hidup karena bingkai ini tidak dapat disamakan dengan bingkai lain akibat keunikannya. Suatu bingkai lingkungan belum tentu mencakup semua warga kota dan bukan bersifat material. Kriteria suatu demonstrasi masuk dalam kategori tertentu adalah sebagai berikut:

1. Warga negara. Demonstrasi masuk dalam bingkai warga negara jika melibatkan kepentingan umum warga kota.

2. Ideologis. Suatu demonstrasi bersifat ideologis karena mengarah pada ide mengenai tata kelola pemerintahan yang baik secara demokratis.
3. Kelompok kurang beruntung (*disadvantaged*). Demonstrasi dalam kelompok ini jika demonstrasi melibatkan masyarakat yang menginginkan kondisi yang lebih baik dari kondisi awal yang lebih buruk dibandingkan rata-rata warga kota.
4. Etnik. Demonstrasi etnik berkaitan dengan dampak proyek terhadap etnik tertentu.
5. Teritorial. Demonstrasi tergolong teritorial jika fokus pada dampak proyek terhadap wilayah tertentu.
6. Usia. Demonstrasi tergolong demonstrasi usia jika fokus pada isu yang hanya dihadapi kelompok usia tertentu.
7. Fungsional. Demonstrasi tergolong fungsional jika berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari suatu sistem.
8. Agama. Demonstrasi tergolong demonstrasi usia jika fokus pada isu yang hanya dihadapi kelompok agama tertentu.
9. Material. Demonstrasi material adalah demonstrasi yang fokus pada kebijakan infrastruktur.
10. Gender. Demonstrasi tergolong demonstrasi usia jika fokus pada isu yang hanya dihadapi kelompok gender tertentu.
11. Keluarga. Demonstrasi tergolong demonstrasi usia jika fokus pada isu yang hanya dihadapi keluarga.
12. Lingkungan. Demonstrasi yang bertema protes terhadap dampak ekologis dari suatu proyek termasuk dalam bingkai lingkungan.

Peneliti mengumpulkan semua headline berita dari situs berita nasional yaitu Kompas.com, tirto.id, dan Antara, serta situs resmi pemerintah Kota Jakarta. Rentang berita yang dikumpulkan adalah selama 10 tahun yaitu 2014 - 2024. Kata kunci yang digunakan adalah "demo" atau "demonstrasi" yang dikombinasikan dengan kata "Jakarta". Karena unit analisis adalah kejadian demonstrasi, maka dua atau lebih berita yang meliput demonstrasi yang sama dianggap satu unit analisis. Setiap kejadian demonstrasi diberikan dua tema dari 11 bingkai yang ada. Penggunaan dua tema ini penting karena bingkai konstituen bukan saja menyorot pada siapa yang diperjuangkan tetapi juga isu apa yang diperjuangkan.

Kriteria eksklusi adalah demonstrasi yang dilakukan di Jakarta tetapi berkaitan dengan kebijakan di tingkat nasional. Sebagai ibukota Indonesia pada saat penelitian ini dilakukan, demonstrasi di tingkat nasional dapat berlangsung pula di Kota Jakarta. Karakteristik dari demo tingkat nasional adalah diselenggarakan di depan lembaga nasional seperti Istana Negara atau gedung KPK. Contoh demo ini adalah demo yang memprotes UU Cipta Kerja yang diselenggarakan di depan gedung DPR/MPR. Selain itu, demonstrasi tingkat nasional melibatkan partisipan dari luar Jakarta. Sebagai contoh, demo 212 yang bertujuan menurunkan Gubernur Jakarta melibatkan partisipan dari kawasan provinsi Banten dan Jawa

Barat (Sumaktoyo, 2021). Jika demo tersebut dilakukan di lokasi tingkat nasional atau melibatkan partisipan dari luar Jakarta, maka demo tersebut tidak dimasukkan ke dalam data.

## Hasil & Pembahasan

Sebanyak 67 demonstrasi berhasil dikumpulkan dengan sebaran satu demonstrasi di tahun 2014, satu di tahun 2015, empat di tahun 2016, tujuh di tahun 2017, tujuh di tahun 2018, 13 di tahun 2019, tujuh di tahun 2020, 16 di tahun 2021, delapan di tahun 2022, dan tiga di tahun 2023. Jumlah ini, walau begitu, tidak mewakili persebaran jumlah demonstrasi yang sesungguhnya terjadi. Jumlah ini lebih menggambarkan ketertarikan media terhadap demonstrasi yang terjadi di Kota Jakarta sekaligus fungsi dari algoritma pencarian yang ada pada situs berita, yang umumnya mengutamakan berita-berita baru dan menghilangkan berita yang terlalu lama.

Tabel 1 berikut menunjukkan statistik dari demonstrasi berdasarkan bingkai. Karena setiap demonstrasi memiliki dua bingkai, maka persentase diperoleh dari pembagian dengan 67, walaupun nilai total adalah 134. Dari tabel diketahui bahwa dua pertiga (66%) demonstrasi yang terjadi berkaitan dengan isu teritorial, sementara isu kepentingan umum kurang lebih separuh (54%) dari seluruh demonstrasi yang ada. Demonstrasi yang berhubungan dengan ideologi, kelompok kurang beruntung, fungsional, material, dan lingkungan masing-masing adalah 15%, 19%, 19%, 10%, dan 16%. Tidak ada demonstrasi yang menggunakan bingkai etnik, usia, agama, gender, dan keluarga.

**Tabel 1. Bingkai Demonstrasi Publik Jakarta**

No	Bingkai	Jumlah	Persen	Contoh
1	Warga negara	36	54%	Demo menuntut pengelolaan air limbah yang lebih baik (14 Agustus 2018), demo menuntut hak atas air bersih (29 Agustus 2018), dan demo menuntut transparansi anggaran pembangunan (9 Agustus 2019)
2	Ideologis	10	15%	Demo menuntut penegakan hukum yang lebih adil terkait pembangunan (3 Mei 2019), demo penghancuran bangunan warisan sejarah (30 Juli 2019), dan demo pelestarian pasar rakyat (22 April 2021)
3	Kelompok kurang beruntung	13	19%	Demo menuntut penyediaan rumah murah bagi masyarakat miskin (5 November 2017), demo menuntut perlindungan terhadap UMKM dari dampak pembangunan (12 Oktober 2018), dan demo menolak privatisasi pasar rakyat (5 Oktober 2020)

4	Etnik	0	0%	Tidak ada
5	Teritorial	44	66%	Demo menolak proyek MRT di Fatmawati (9 Oktober 2014), demo menolak penggusuran Kampung Pulo (20 Agustus 2015), demo menolak reklamasi Teluk Jakarta (24 April 2016)
6	Usia	0	0%	Tidak ada
7	Fungsional	13	19%	Demo integrasi JakLingko (19 Maret 2019), demo kebijakan lalu lintas ganjil genap (12 Agustus 2019), demo menuntut perbaikan transportasi umum (22 November 2019)
8	Agama	0	0%	Tidak ada
9	Material	7	10%	Demo regulasi pencemaran suara (18 April 2021), demo manajemen limbah (10 Mei 2021), dan demo perawatan ruang terbuka hijau (1 Oktober 2021)
10	Gender	0	0%	Tidak ada
11	Keluarga	0	0%	Tidak ada
12	Lingkungan	11	16%	Demo menuntut pengelolaan sampah yang lebih baik (4 Desember 2019), demo pencemaran air (17 Juni 2021), demo kebijakan reduksi emisi (25 Oktober 2021)

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis mencoba memberikan penjelasan dari masing-masing temuan adalah sebagai berikut:

Bingkai warga negara (citizen). Sebanyak 36 atau 54% demonstrasi berkaitan dengan bingkai warga negara. Semua demonstrasi yang menggunakan masyarakat umum (tanpa segmentasi) sebagai kelompok pemprotes diberikan bingkai warga negara. Isu yang diangkat beragam dan menyentuh banyak aspek kehidupan. Selain contoh yang diberikan di Tabel 1, masyarakat umum Jakarta melakukan demonstrasi untuk memperoleh pembangunan perumahan yang lebih terakses dan terjangkau (15 November 2020). Mereka juga memprotes kualitas transportasi publik yang buruk dan menuntut perbaikan (15 September 2020). Masyarakat juga pernah melakukan demonstrasi pada tanggal 28 Januari 2022 terhadap proyek Jakarta Smart City dengan mempertanyakan inklusivitas dan transparansi proyek ini.

Bingkai ideologi. Sebanyak 10 atau 15% demonstrasi berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai ideologi pembangunan. Contoh demonstrasi ideologis adalah demo menuntut transparansi proyek pembangunan Jakarta International Stadium,

demo menentang pengurangan ruang terbuka hijau karena adanya proyek-proyek pembangunan baru, dan demo menolak pembongkaran bangunan bersejarah.

Bingkai kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged). Protes yang memperjuangkan nasib kelompok yang kurang beruntung menyusun 19% dari total sampel demonstrasi. Demo yang terkait dengan kelompok yang kurang beruntung ini contoh lainnya adalah demo menentang rencana relokasi penduduk ke rumah susun, demo menolak penggusuran pemukiman nelayan, dan demo menolak pembebasan lahan tanpa ganti rugi yang layak.

Bingkai teritorial. Bingkai teritorial adalah bingkai terbanyak dengan 66% atau 44 demonstrasi berhubungan dengan permasalahan spasial ini. Contoh demonstrasi dalam bingkai teritorial adalah demonstrasi yang berfokus pada pendekatan pemkot dalam mengelola sumberdaya air, protes terhadap pemakaian ruang publik untuk kepentingan komersial, dan demo pedagang kaki lima yang menolak rencana relokasi.

Bingkai fungsional. Bingkai fungsional berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan publik, dan isu ini muncul dalam 13 atau 19% demonstrasi. Contoh bingkai fungsional adalah demo menuntut peningkatan fasilitas pendidikan, demo menuntut perbaikan infrastruktur dan keselamatan pejalan kaki, dan demo menolak pembangunan jalan tol dalam kota.

Bingkai material. Bingkai ini berhubungan dengan infrastruktur kota. Bingkai material dimunculkan dalam tujuh atau 10% demonstrasi. Demo yang tergolong bingkai material contohnya demo menuntut pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), demo memprotes kondisi hidup yang buruk di proyek perumahan rakyat, dan demo realisasi perumahan DP 0 Rupiah.

Bingkai lingkungan. Bingkai ini hanya muncul 11 kali atau 16% dalam sampel demonstrasi yang berhasil dikumpulkan. Contoh demonstrasi dengan bingkai lingkungan adalah demo menolak pembangunan hotel di daerah konservasi, demo mendukung penyelamatan kawasan hutan kota, dan demo penguatan langkah-langkah tindakan mitigasi perubahan iklim di Kota Jakarta.

Dari 12 bingkai yang dinilai, ada lima bingkai yang tidak memiliki demonstrasi: etnik, usia, agama, gender, dan keluarga. Sementara itu, bingkai teritorial menjadi bingkai terbanyak diikuti bingkai warga negara. Adapun bingkai ideologis, disadvantaged, functional, material, dan environmental, seluruhnya dalam jumlah yang relatif seimbang yaitu dalam rentang antara 7 hingga 13 demonstrasi.

Dominasi bingkai teritorial dapat disebabkan karena warga Jakarta memiliki identitas kolektif yang kuat terkait teritorial mereka. Dalam kawasan yang padat penduduk dan harga tanah sangat tinggi, gangguan terhadap teritorial dapat menjadi isu yang sangat sensitif dan mudah untuk memicu konflik. Masyarakat tidak ingin mengalami relokasi dari tanah yang telah ditempatinya secara susah payah. Kompetisi ruang adalah karakteristik dari kota besar dan menjadi masalah dalam berbagai program pembangunan (Cruz-Daraviña, Sánchez-Díaz, & Bocarejo Suescún, 2021; Sha, Shao, Lu, & Niu, 2021).

Bingkai warga negara juga merupakan bingkai dominan dalam temuan penelitian. Dominasi bingkai ini dapat dianggap wajar karena isu yang diangkat menyinggung kepentingan umum, yang berarti semua warga negara merasakan akibat dan berhak mengajukan protes. Menurunnya ruang publik hijau, sistem pengendalian banjir yang dianggap tidak mencukupi, maupun emisi kendaraan yang terlalu parah menjadi gangguan bagi publik tanpa melihat lapisan sosial mereka. Karena dampak yang luas ini, maka wajar jika respon yang muncul besar dan lebih mungkin dimuat dalam berita di media massa. Gerakan massa yang besar diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar pada kebijakan publik yang diprotes, khususnya dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih adil (Ufaira, Amir, Indraprahasta, & Nastiti, 2023) dan melibatkan masyarakat di dalamnya (Oikonomaki, Papadaki, & Kakderi, 2024).

Bingkai ideologis, disadvantaged, functional, material, dan environmental yang relatif seimbang menandakan bahwa isu-isu yang dimunculkan oleh warga kota dalam merespon kebijakan publik. Keragaman isu ini sejalan dengan kompleksitas yang ada di lingkungan perkotaan dan keragaman yang dimiliki warga kota dalam kesadaran atas hak-hak mereka untuk mempengaruhi kebijakan secara jangka panjang. Temuan ini menandakan bahwa warga kota akan jauh lebih mudah tergerak oleh isu-isu teritorial ketimbang isu tata kelola pemerintahan kota, isu ketidakadilan pada kelompok masyarakat tertentu, isu kualitas sarana dan prasarana publik, isu pembangunan infrastruktur, dan isu dampak lingkungan. Isu spasial merupakan kebutuhan paling dasar manusia, yaitu kebutuhan ruang dan tempat tinggal. Ruang inilah tempat terbangunnya isu-isu lain seperti ekonomi, sosial, politik, ekologi, dan tata kelola (Bahers, Athanassiadis, Perrotti, & Kampelmann, 2022). Kebijakan mengenai teritorial mengimplikasikan relasi kuasa dalam menentukan batasan dan menegaskan kepentingan geografis serta kapasitas otoritatif dan alokatif (Miller & Mössner, 2020). Heterogenitas ruang di kota mencerminkan beragam kepentingan yang berkontestansi menjadi partisipan atau sebaliknya, tereksklusi dari ruang yang berubah (Pickett et al., 2024).

Hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ternyata tidak muncul berita mengenai demonstrasi yang bertemakan etnik, usia, agama, gender, dan keluarga. Demonstrasi yang demikian sebenarnya ada namun tampak tidak menarik bagi media dan jumlahnya sangat sedikit. Demonstrasi bertema gender dan keluarga bahkan dapat dianggap seremonial karena diselenggarakan pada hari-hari peringatan tertentu dengan tema yang terlalu umum.

Di sisi lain, tema etnik dan agama tampak sebagai tema yang sensitif bagi masyarakat di Indonesia yang multietnik dan multiagama. Pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 30 tahun lebih telah berhasil menanamkan ide bahwa isu suku, ras, agama, dan golongan (disingkat SARA) adalah isu yang haram untuk dibahas karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Alasan lain adalah karena Jakarta adalah kota dengan komposisi etnik pendatang yang sangat tinggi. Etnik asli Jakarta adalah etnik Betawi yang hanya menyusun sekitar 27.65% jumlah penduduk Jakarta (Pangesti, 2021). Etnik Betawi adalah etnik yang sangat terbuka dan toleran, yang menjelaskan mengapa komposisi etnik di Jakarta sangat beragam tanpa ada konflik yang nyata dengan penduduk asli Betawi.

Terkait agama, Jakarta juga merupakan kawasan yang multi-agama. Ketegangan agama bukannya tidak ada di Jakarta. Konstestansi ruang yang ada di Jakarta juga mencakup ruang-ruang religius (Hoon, 2015). Hanya saja, isu ini tampak tertahan oleh paradigma SARA sehingga tidak mencuat ke permukaan sebagai demonstrasi kelompok agama tertentu.

Demonstrasi bertema usia dapat dikatakan tidak ada di Jakarta, kecuali jika kita memandang pendidikan sebagai suatu isu usia. Tema pendidikan dapat dianggap sebagai bingkai usia karena secara formal, hanya kelompok usia tertentu yang menduduki suatu jenjang pendidikan. Walaupun begitu, hanya ada satu demonstrasi yang diketahui menyorot isu pendidikan, yaitu demonstrasi yang menuntut peningkatan fasilitas pendidikan tanggal 28 Januari 2020. Demonstrasi ini tidak dikategorikan berbingkai usia karena aspek yang diprotes adalah fasilitas dan peserta protes bukan hanya siswa, tetapi juga orang tua dan para guru. Di dalam data, demonstrasi ini dikode sebagai demonstrasi berbingkai warga negara dan fungsional karena menyentuh warga kota secara umum dan berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari fasilitas pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa warga Jakarta memanfaatkan ruang publik untuk membentuk kebijakan inklusif dan memicu perubahan sosial dengan cara berdemonstrasi. Isu-isu yang dianggap penting bagi mereka adalah isu-isu spasial dan isu-isu yang menyentuh kepentingan publik secara umum. Temuan ini mengungkap betapa pentingnya keadilan spasial bagi masyarakat urban untuk menjaga berlangsungnya pembangunan yang adil dan dapat diterima semua pihak.

## **Kesimpulan**

Dalam konteks penerapan demokrasi di Jakarta, penelitian ini memeriksa bagaimana warga kota Jakarta melakukan komunikasi politik untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan menyentuh kepentingan publik. Peneliti mempertimbangkan bahwa narasi demonstrasi masih merupakan wilayah riset yang masih belum tereksplorasi dalam studi komunikasi politik. Peneliti mengidentifikasi tema umum mengenai kepentingan publik dan persaingan teritorial sebagai tema yang paling mengemuka dalam demonstrasi warga Jakarta. Temuan penelitian ini melebihi dorongan pembangunan spesifik dari setiap demonstrasi dan memiliki signifikansi teoritis terhadap teori ruang publik. Penelitian ini menyorot aspek unik dari komunikasi politik di ruang publik perkotaan dalam bentuk partisipasi langsung warga negara dengan tindakan resistensi non-kekerasan. Selain itu, secara praktis penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendesain ruang publik yang dapat memfasilitasi komunikasi politik dan keterlibatan sipil yang konstruktif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kategorisasi demonstrasi dengan tema-tema spesifik yang mungkin terlalu sederhana. Pendekatan kategori ganda mungkin masih belum cukup kompleks dalam mengkategorikan beberapa demonstrasi. Penelitian selanjutnya perlu menyelidiki dampak nyata dari demonstrasi terhadap perubahan kebijakan dan keputusan pembangunan kota Jakarta sehingga dapat menilai efektivitas dari demonstrasi sebagai bentuk komunikasi dan partisipasi politik.

### Daftar Pustaka

- Bahers, J.-B., Athanassiadis, A., Perrotti, D., & Kampelmann, S. (2022). The place of space in urban metabolism research: Towards a spatial turn? A review and future agenda. *Landscape and Urban Planning*, 221, 104376. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104376>
- Billahi, S. (2025). Demokrasi, Islam, dan Etika Publik: Memahami Politik Kewargaan di Indonesia. *Studia Islamika*, 32(1), 161–174. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i1.46244>
- Cruz-Daraviña, P. A., Sánchez-Díaz, I., & Bocarejo Suescún, J. P. (2021). Bus Rapid Transit (BRT) and Urban Freight – Competition for Space in Densely Populated Cities. *Sustainability*, 13(12), 6611. <https://doi.org/10.3390/su13126611>
- Fredriksson, M., & Tritter, J. (2020). Getting involved: The extent and impact of patient and public involvement in the Swedish health system. *Health Economics, Policy and Law*, 15(3), 325–340. <https://doi.org/10.1017/S174413311900015X>
- Habermas, J. (2020). The Public Sphere: An Encyclopedia Article. In *Critical Theory and Society* (pp. 136–142). Routledge.
- Hoon, C.-Y. (2015). Contested Religious Space in Jakarta: Negotiating Politics, Capital, and Ethnicity. In P. van der Veer (Ed.), *Handbook of religion and the Asian city: Aspiration and urbanization in the twenty-first century* (pp. 201–218). Oakland, California: University of California Press.
- Jubba, H., Baharuddin, T., Pabbajah, M., & Qodir, Z. (2020). Dominasi Internet di Ruang Publik: Studi Terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela Islam 212 di Indonesia. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 1. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.1631>
- Khodary, Y., & Salah, N. (2020). Palestinian Women’s Agency. *Peace Review*, 32(1), 86–94. <https://doi.org/10.1080/10402659.2020.1823573>
- Larsen, H. (2020). The public sphere and Habermas: Reflections on the current state of theory in public library research. *Journal of Documentation*, 77(1), 251–258. <https://doi.org/10.1108/JD-05-2020-0075>
- McDonough, A., & Rodríguez, D. C. (2020). How donors support civil society as government accountability advocates: A review of strategies and implications for transition of donor funding in global health. *Globalization and Health*, 16(1), 110. <https://doi.org/10.1186/s12992-020-00628-6>
- Miller, B., & Mössner, S. (2020). Urban sustainability and counter-sustainability: Spatial contradictions and conflicts in policy and governance in the Freiburg and Calgary metropolitan regions. *Urban Studies*, 57(11), 2241–2262. <https://doi.org/10.1177/0042098020919280>
- Oikonomaki, E., Papadaki, I., & Kakderi, C. (2024). Promoting Green Transformations through Smart Engagement: An Assessment of 100 Citizen-Led Urban Greening Projects. *Land*, 13(4), 556. <https://doi.org/10.3390/land13040556>
- Pangesti, A. (2021). Betawi Ethnic: Critical Discourse Study. *Living the New Normal: Achieving Resilience and Ensuring Sustainable Future*, 488–495. UNHI Press.
- Pickett, S. T. A., Simone, A. T., Anderson, P., Sharifi, A., Barau, A., Hoover, F.-A., ... Ginsberg, J. (2024). The relational shift in urban ecology: From place and structures to multiple modes of coproduction for positive urban futures. *Ambio*, 53(6), 845–870. <https://doi.org/10.1007/s13280-024-02001-y>
- Rahman, D. F. (2022). Selama Awal Pandemi Ada 900-an Demonstrasi di DKI Jakarta. *Kata Data*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/selama-awal-pandemi-ada-900-an-demonstrasi-di-dki-jakarta>

- Ridwan, M., & Musta'in, M. (2017). Wacana Paham Keagamaan TV One dan Metro TV dalam Pemberitaan Demo 411 di Jakarta. *Jurnal KOMUNIKA*, 02(11).  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158639821>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454.  
<https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Sha, Y., Shao, R., Lu, L., & Niu, C. (2021). Estimating the Impact of Urban Space Competition on Flood Risk: Case Study of the Lanzhou Reaches of Yellow River, China. *Natural Hazards Review*, 22(3), 04021025. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)NH.1527-6996.0000468](https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000468)
- Sumaktoyo, N. G. (2021). Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial election. *Journal of East Asian Studies*, 21(1), 141–164. <https://doi.org/10.1017/jea.2020.35>
- Ufaira, R., Amir, S., Indraprahasta, G. S., & Nastiti, A. (2023). Living in a hot city: Thermal justice through green open space provision. *Frontiers in Human Dynamics*, 5, 1237515. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1237515>
- Winarso, H., Hudalah, D., & Firman, T. (2015). Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area. *Habitat International*, 49, 221–229.  
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.05.024>
- Wonka, A. (2024). Policy and constituency frames in the advocacy of political parties and interest groups in policy-making. *Journal of European Public Policy*, 31(2), 352–373.  
<https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2138952>